



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Bandara Juanda KP 1135 Surabaya ☎ (031) 8670360 - 2 Fax 8670373

Laporan Hasil Evaluasi Kompilasi LAKIP

**SE = KABUPATEN**

**LAMONGAN**

**Tahun 2001**

Nomor : LHE - 5329/PW.13.3 /2002  
Tanggal : 4 Desember 2002



# Daftar Isi

|                                                                    | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF                                                 | 1       |
| BAGIAN I                                                           |         |
| BAB 1 SIMPULAN                                                     | 4       |
| BAB 2 SARAN                                                        | 9       |
| BAGIAN II URAIAN HASIL EVALUASI                                    |         |
| BAB 1 UMUM                                                         |         |
| 1. Dasar Hukum Evaluasi                                            | 11      |
| 2. Tujuan Evaluasi                                                 | 11      |
| 3. Ruang Lingkup Evaluasi                                          | 12      |
| 4. Metodologi Evaluasi                                             | 13      |
| 5. Informasi Singkat Pemerintah Kabupaten<br>Lamongan dan Evaluasi | 14      |
| 6. Gambaran Umum Implementasi Sistem<br>AKIP                       | 15      |
| BAB 2 URAIAN HASIL EVALUASI                                        |         |
| 1. Evaluasi Atas Sistem AKIP                                       | 17      |
| 1) Evaluasi Atas Perencanaan Strategis                             | 17      |
| 2) Evaluasi Atas Sistem Pengukuran Kinerja                         | 24      |
| 3) Evaluasi Atas LAKIP                                             | 30      |
| 2. Evaluasi Atas Keterkaitan Renstra Dengan<br>Propeda / Repetada  | 32      |
| 3. Evaluasi Kinerja                                                | 36      |



# Ikhtisar Eksekutif

Evaluasi atas LAKIP untuk instansi pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 dilakukan terhadap 4 (empat) Instansi pemerintah yang seluruhnya LAKIP Eselon II. Jumlah instansi pemerintah yang dievaluasi ini merupakan sebagian dari 13 instansi pemerintah yang seharusnya memiliki LAKIP 2001. LHE ini merupakan kompilasi dari LHE individual instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- Evaluasi atas LAKIP tahun 2001 difokuskan pada evaluasi atas implementasi sistem AKIP yang mencakup evaluasi atas perencanaan strategik yang telah disusun, sistem pengukuran kinerja yang digunakan dan muatan informasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  
Tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melakukan proses penyempurnaan sistem AKIP yang diimplementasikan dimasa mendatang.
- Evaluasi atas Perencanaan Strategik menunjukkan bahwa proses perumusan Renstra pada sejumlah Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berusaha mengarah pada proses perumusan Renstra yang baik. Namun demikian untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan implementasinya diperlukan adanya peningkatan dalam mengkomunikasikan Renstra kepada pihak-pihak terkait, memperjelas rumusan sasaran dan memanfaatkan Renstra dalam membuat Perencanaan Operasional, Perencanaan Kinerja dan penyusunan Anggaran.
- Evaluasi atas sistem pengukuran kinerja menunjukkan bahwa penetapan indikator kinerja pada sejumlah instansi pemerintah telah mengarah pada usaha diimplementasikannya sistem pengukuran kinerja yang baik. Namun demikian



untuk memperlihatkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan/sasaran perlu disajikan indikator kinerja sasaran yang realistis.

- Evaluasi atas muatan informasi kinerja dalam LAKIP menunjukkan bahwa secara umum LAKIP para Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berusaha mengarah pada penyajian informasi yang baik ditinjau dari aspek-aspek relevan, akurasi perhitungan, konsistensi, verifikasi, agregasi, memberi motivasi, wajar, dan andal.
- Penilaian kinerja atas capaian kinerja pada tingkat sasaran pada berbagai instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 tidak dapat dilakukan karena LAKIP belum dapat menyajikan informasi kinerja sebagaimana mestinya. LAKIP juga belum mengungkapkan sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2001. Implikasinya, meskipun secara nyata berbagai organisasi ini telah mampu menghasilkan kinerja namun ketidakjelasan sasaran dan ukuran kerjanya mengakibatkan informasi capaian kinerja tidak terungkap di dalam LAKIP. Konsekuensinya, masyarakat atau pihak terkait lainnya tidak dapat menilai apakah Instansi Pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamongan telah berhasil melaksanakan misinya yang tertuang di dalam sasaran-sasaran strategiknya. Padahal mungkin saja terjadi bahwa berbagai organisasi ini sesungguhnya telah berhasil mencapai kinerja sesuai dengan misi yang diembannya, namun tidak terungkap dalam LAKIP.
- Hasil menyeluruh dari evaluasi atas LAKIP dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 menunjukkan bahwa instansi-instansi pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu segera melakukan penyempurnaan atas sistem AKIP.

Aspek-aspek yang perlu disempurnakan antara lain mencakup:

1. Penyempurnaan terhadap proses penyusunan Rencana Strategik dengan secara memadai menyelaraskan tujuan strategik, sasaran strategik dan strategi pencapaiannya (kebijakan, program dan kegiatan).
2. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran kinerja dengan mendefinisikan indikator kinerja pada tingkat tujuan/sasaran yang diselaraskan dengan



indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Hal ini disertai dengan membangun sistem pengumpulan data yang memadai

3. Menetapkan target kinerja setiap awal periode sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal dan menuangkannya ke dalam suatu Rencana Kinerja.

Surabaya, 4 Desember 2002



Kepala

**Muhammad Aswir**

**NIP. 060026745**



Bagian 1  
BAB 1

# Simpulan

Simpulan hasil evaluasi atas LAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 mencakup simpulan hasil evaluasi atas implementasi dan substansi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Beberapa hal yang penting dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

## Gambaran Umum

Jumlah populasi instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 13 satker, yang seluruhnya adalah eselon II. Satker tersebut terdiri dari 8 Dinas, 3 Badan, 1 Sekretaris Daerah, 1 Sekretaris Dewan.

Dari 13 Instansi Pemerintah yang ada, jumlah evaluasi yang dievaluasi pada Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah 4 Instansi Pemerintah yang seluruhnya setingkat Eselon II atau 30,76 % dari jumlah instansi pemerintah yang seharusnya dievaluasi.

Kondisi umum implementasi sistem AKIP dari instansi pemerintah yang dievaluasi memperlihatkan bahwa ke 4 (enam) instansi pemerintah tersebut telah mengimplementasikan sistem AKIP meskipun belum sempurna.



## Evaluasi atas Perencanaan Strategik.

Secara umum proses penyusunan Renstra, isi dan substansi Renstra, dan pemanfaatan Renstra belum dilakukan dengan baik sehingga masih perlu disempurnakan, khususnya berkaitan dengan :

### Proses Perumusan Renstra.

Dari hasil evaluasi atas proses perumusan rencana strategik diketahui bahwa 3 (tiga) evaluasi belum mendokumentasikan dengan baik, 1 (dua) evaluasi belum sepenuhnya merumuskan renstra secara partisipatif dan 1 (satu) evaluasi belum sepenuhnya mengkomunikasikan renstra kepada anggota organisasi dengan baik.

### Isi dan Substansi Renstra

Dari hasil evaluasi atas isi dan substansi rencana strategik diketahui bahwa perumusan visi sebagai salah satu komponen Renstra telah dilakukan dengan baik dan dalam menetapkan tujuan dan sasarannya telah mempertimbangkan sumber daya organisasi.

Namun demikian masih terdapat 1 (dua) evaluasi belum memenuhi komponen Renstra secara lengkap dan masih terdapat perumusan komponen renstra lainnya yang belum dilakukan dengan baik meliputi : misi (0 evaluasi), tujuan (1 evaluasi), sasaran (2 evaluasi) dan strategi pencapaian tujuan/sasaran (1 evaluasi).

### Pemanfaatan Renstra

Dari hasil evaluasi atas pemanfaatan Renstra diketahui bahwa renstra belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh ke 4 (empat) instansi pemerintah dalam proses pengambilan



keputusan berupa perencanaan operasional, perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran. Secara umum, hal ini terjadi karena penetapan Renstra dilakukan pada saat tahun anggaran sudah berjalan.

## Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja

Secara umum Sistem pengukuran kinerja yang meliputi Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan evaluasi kinerja perlu disempurnakan, khususnya berkaitan dengan :

### Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, terdapat 3 (tiga) evaluasi belum menetapkan indikator kinerja secara lengkap. 3 (tiga) evaluasi yang belum memenuhi kualitas indikator kinerja yang baik dan sebanyak 3 (tiga) evaluasi belum sepenuhnya mengkomunikasikan ke setiap level organisasi mengenai target dan indikator kinerja organisasi yang ditetapkan.

### Evaluasi Kinerja.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan, sebanyak 2 (dua) evaluasi belum merancang dan mengembangkan system pengumpulan data kinerja ; 4 (empat) evaluasi belum melakukan perbandingan data kinerja; 2 (dua) evaluasi belum menggunakan informasi kinerja untuk keperluan monitoring program dan kegiatan; 4 (empat) evaluasi belum melakukan analisa data kinerja dan 4 (empat) evaluasi belum melakukan self evaluation atas capaian kinerjanya.



## Evaluasi atas Penyajian dan Pemanfaatan Informasi LAKIP.

---

Secara umum isi informasi LAKIP serta pemanfaatannya perlu disempurnakan, khususnya berkaitan dengan :

### Isi Informasi LAKIP

Sebanyak 1 (satu) evaluasi LAKIP yang disajikan belum memenuhi karakteristik informasi yang baik; dan sebanyak 1 (satu) evaluasi kurang lengkap dalam menyajikan informasi dalam LAKIP.

### Pemanfaatan LAKIP.

Hanya 1 (satu) evaluasi yang belum mendistribusikan LAKIP kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat 2 (dua) evaluasi yang belum memanfaatkan LAKIP dalam pengambilan keputusan, peningkatan kinerja instansi, menentukan kecukupan akuntabilitas kinerja instansi dan untuk menilai dan memperbaiki kebijakan.

## Evaluasi atas Keterkaitan Renstra Dengan Propeda

---

Dari hasil evaluasi ke empat Renstra Dinas/ Badan telah terkait dengan Propeda dan Poldas

## Evaluasi atas Kinerja Instansi Pemerintah.

---

Penilaian kinerja atas capaian kinerja pada tingkat sasaran pada berbagai instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 tidak dapat dilakukan karena LAKIP belum dapat menyajikan informasi kinerja



sebagaimana mestinya. LAKIP juga belum mengungkapkan sasaran secara nyata berbagai organisasi ini telah mampu menghasilkan kinerja namun ketidak jelasan sasaran dan ukuran kinerjanya mengakibatkan informasi capaian kinerja tidak terungkap didalam LAKIP. Konsekuensinya, masyarakat atau pihak terkait lainnya tidak dapat menilai apakah Instansi yang tertuang didalam sasaran - sasaran strategiknya. Padahal mungkin saja terjadi bahwa berbagai organisasi ini sesungguhnya telah berhasil mencapai kinerja sesuai dengan misi yang diembannya, namun tidak terungkap dalam LAKIP



Bagian 1  
BAB 2

# Saran

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan informasi LAKIP pada instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya dan sistem AKIP pada umumnya, kami telah menyarankan kepada para pimpinan instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dalam proses penyusunan rencana strategik, terutama dalam proses merumuskan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan/sasaran (kebijakan/program/kegiatan). Disamping hal tersebut diatas, ada baiknya apabila para instansi pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan merumuskan tujuan dan sasaran dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan serta memperhatikan keseimbangan focus eksternal dan internal, dengan menerapkan pendekatan Balanced Scorecard.
2. Menyelaraskan antara indikator kinerja sasaran dan tujuan dengan indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasarnya. Keselarasan indikator kinerja outcome pada Kegiatan dan Tujuan/Sasaran harus selalu dijaga agar memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan memang mendukung pencapaian Tujuan/Sasaran organisasi.
3. Menetapkan target - target kinerja untuk masing - masing indikator kinerja, terutama untuk tingkat Sasaran, pada awal periode sebelum kegiatan dilakukan. Target kinerja ini kemudian dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja. Rencana Kinerja akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan



**Anggaran Kinerja.**

4. Merancang sistem pengukuran data - data kinerja secara memadai agar dapat menghasilkan informasi kinerja yang valid dan andal. Informasi kinerja ini akan digunakan untuk keperluan monitoring program dan kegiatan oleh manajemen masing - masing instansi pemerintah.
5. Kepada Bupati Lamongan disarankan agar mendorong seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk berakuntabilitas dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No . 580/X/8/V/99.



Bagian 2  
BAB 1

# U mum

## 1. Dasar Hukum Evaluasi

*Inpres No. 7 Tahun  
1999, Surat Tugas  
Kepala Perwakilan  
BPKP Prop. Jatim  
dan Surat Deputi  
Bid. Penyelenggaraan  
Akuntabilitas*

Evaluasi terhadap LAKIP Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 didasarkan pada :

1. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur Nomor : ST- 2791 /PW.13.3/2002 tanggal 26 September 2002
3. Surat Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Akuntabilitas No.5-04.02.00-203/D.III/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Kebijakan Evaluasi LAKIP 2001.
4. Nota Dinas No 81/B.III/2002 tanggal 8 Nopember 2002

## 2. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas LAKIP tahun 2001 untuk instansi - instansi pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk :

*Mendapatkan*

1. Mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam



*informasi SAKIP dan  
menilai Kinerja*

rangka mengembangkan dan menyempurnakan Sistem AKIP :

- > Memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi SAKIP
- > Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan system AKIP
- > Memperlihatkan keterkaitan antara Renstra dan LAKIP dengan Propenas/Propeda dan Repeta/Repetada
- > Memberikan rekomendasi konstruktif dalam penyempurnaan SAKIP

2. Menilai kinerja instansi :

- > Menginformasikan keberhasilan pencapaian sasaran

Memberikan rekomendasi konstruktif guna peningkatan akuntabilitas kinerja

---

### **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

---

Langkah dan prosedur evaluasi LAKIP dilakukan berdasarkan Pedoman Evaluasi LAKIP BPKP Tahun 2002. Sedangkan ruang lingkup evaluasi terhadap LAKIP instansi- instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 meliputi :

*Implementasi  
SAKIP dan Kinerja*

- > Evaluasi atas implementasi dan substansi sistem AKIP pada instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang meliputi evaluasi atas rencana strategik, evaluasi atas sistem pengukuran kinerja, evaluasi atas penyajian informasi LAKIP dan evaluasi atas keterkaitan renstra dan propeda.
- > Evaluasi atas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang



difokuskan pada sejauh mana instansi pemerintah telah mencapai sasaran stratejik yang ditetapkan.

Pada setiap bagian evaluasi tersebut diatas dilakukan analisis terhadap permasalahan yang timbul baik didalam proses penyusunan LAKIP dan pemanfaatan informasi yang tertuang didalamnya maupun pelaksanaan program/kegiatan instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya.

Sebagai produk hasil evaluasi LAKIP ini, evaluator akan membuat simpulan atas kondisi, permasalahan, dan strategi permasalahan serta memberikan rekomendasi dan saran - saran perbaikan.

---

#### 4. Metodologi Evaluasi

---

*Evaluasi terbatas  
dengan metode step  
by step, program  
logic dan matrik  
konversi*

Evaluasi atas LAKIP tahun 2001 dilakukan terhadap 4 (empat) instansi pemerintah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan mengacu sepenuhnya pada Pedoman Evaluasi LAKIP 2001 yang dikeluarkan oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Akuntabilitas BPKP. Atas setiap kegiatan evaluasi LAKIP yang dilakukan terhadap instansi pemerintah tersebut diterbitkan LHE individual. Permasalahan yang ditemukan dalam setiap instansi pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ini kemudian dimodifikasi dan disimpulkan untuk dituangkan ke dalam LHE Kompilasi Tingkat Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan demikian, materi dalam LHE Kompilasi Tingkat Pemerintah Kabupaten Lamongan merepresentasikan kondisi dan permasalahan dari implementasi sistem AKIP dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan

Metode evaluasi LAKIP yang digunakan adalah sebagai



berikut :

- Metode *step by step* terhadap implementasi sistem AKIP untuk melihat ketepatan dan kewajaran penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari proses perencanaan strategis sampai pelaporan kinerja organisasi.
- Metode *program logic* digunakan untuk melihat alur pikir perencanaan strategik sesuai dengan pemikiran secara logik, terutama untuk menilai keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan/sasaran.

Kedua metode tersebut dilaksanakan secara bersamaan untuk menghasilkan hasil evaluasi dengan tingkat subyektivitas yang minimal.

---

## 5. Informasi Singkat mengenai Pemerintah Kab. Lamongan dan Evaluatan

---

Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2001 dipimpin oleh MASFUK.SH, sebagai Bupati Lamongan

Jumlah Satker  
setingkat Eselon II  
adalah 13 unit

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, di bentuk beberapa satuan kerja meliputi :

1. Sekretariat Daerah yang dibantu oleh 1 (Satu) Asisten
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas (8 Satker)
4. Badan (3 Satker)
5. Kantor (11 Satker)
6. Kecamatan (27 Kecamatan)



Dari satuan-satuan kerja di atas, instansi pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menurut definisi Inpres No.7/1999 seharusnya mengimplemen tasikan sistem AKIP ada 14 Instansi pemerintah yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan (1 LAKIP)
2. Sekretariat Daerah (1 LAKIP)
3. Sekretariat DPRD (1 LAKIP)
4. Dinas (8 LAKIP)
5. Badan (3 LAKIP)

*Evaluasi 4 LAKIP*

Berdasarkan LAKIP yang kami terima dilakukan evaluasi sebanyak 4 LAKIP terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
2. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lamongan
3. Badan pemberdayaan Masyarakat Kab. Lamongan
4. Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Lamongan

---

## 6. Gambaran Umum Implementasi Sistem AKIP

---

*Dua ) evaluasi  
telah ber-SAKIP,  
yaitu Renstra dan  
LAKIP dan  
2(dua) yang  
belum berenstra*

Terhadap implementasi sistem AKIP dari ke 4 (enam ) evaluasi, kami jumpai kondisi bahwa 4 (empat) evaluasi tersebut telah mengimplementasikan Sistem AKIP Tahun 2001 dalam arti instansi tersebut telah memiliki Renstra dan LAKIP. Renstra yang ada masih berupa prototipe, karena Renstra Kabupaten baru disetujui oleh Dewan pada akhir Oktober 2002

Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta ke 4 (empat) evaluasi dilingkungan kerjanya telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem AKIP yang meliputi



Renstra prototipe tahun 2001 dan LAKIP tahun 2001. Namun demikian LAKIP 2001 belum mengacu pada Renstra.

Hal ini disebabkan penyusunan Renstra Pemkab baru disetujui oleh Dewan pada bulan Oktober 2001. 2001-2005 dilakukan pada bulan Oktober 2001, sedangkan LAKIP PEMKAB untuk tahun 2001 belum dibuat.

Renstra merupakan penjabaran Pola Dasar 2001-2005 yang telah disahkan tanggal 31 Desember 2001 dengan Perda Nomor 06 Tahun 2001 dan Propeda 2001-2005 yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2001 dengan Perda Nomor 07 Tahun 2001. Ke 2 (dua) dokumen perencanaan pembangunan tersebut diberlakukan efektif terhitung mulai tanggal 31 Desember 2001.

Hal ini menunjukkan bahwa LAKIP belum mengacu pada Renstra 2002-2007, karena pengajuan Rancangan APBD tahun 2002 telah dilakukan sebelum Renstra 2002-2007 disahkan.

LAKIP 2001 merupakan LAKIP pertama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang pada umumnya bermaterikan realisasi pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Repetada 2001.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa LAKIP 2001 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih merupakan LAKIP Prototype.



Bagian 2  
BAB 2

# Uraian Hasil Evaluasi

## 1. Evaluasi atas Sistem AKIP

Evaluasi atas  
Renstra, sistem  
pengukuran kinerja  
dan LAKIP

Evaluasi Renstra dan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan evaluasi untuk pertama kali yang diarahkan pada usaha-usaha mengembangkan sistem AKIP. Evaluasi atas sistem AKIP meliputi evaluasi perencanaan strategis, evaluasi sistem pengukuran kinerja dan evaluasi atas penyajian informasi LAKIP.

### Evaluasi atas Perencanaan Strategis

Perumusan, substansi  
dan pemanfaatan  
Renstra

Evaluasi Renstra meliputi evaluasi atas proses perumusan Renstra, isi dan substansi Renstra serta pemanfaatan Renstra.

### Evaluasi atas Proses Perumusan Renstra

Penyusunan Renstra ke 4 Dinas/Badan 2001-2005 dilakukan oleh Tim Perumus Renstra. Dalam proses perumusan ini telah dilakukan penjaringan secara tidak langsung terhadap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui penyuluhan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, swasta dan instansi pemerintah dilingkungan Dinas/Badan Kabupaten Lamongan guna



mendapatkan masukan tentang arah pembangunan sesuai dengan kehendak masyarakat Kabupaten Lamongan.

Hasil kompilasi evaluasi terhadap proses penyusunan renstra pada ke(empat) instansi pemerintah dalam lingkungan Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| No | Proses Perumusan Rencana Strategik |                                                       | Kejadian |                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode                               | Uraian                                                | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 2111                               | Perumusan renstra belum didokumentasikan              | 3        | 75.00           |
| 2  | 2112                               | Perumusan renstra belum dilakukan secara partisipatif | 1        | 25.00           |
| 3  | 2113                               | Renstra belum dikomunikasikan dengan baik             | 1        | 25.00           |
| 4  | 2119                               | Permasalahan lain                                     | -        | -               |

#### Penjelasan

*Perumusan Renstra belum didokumentasikan oleh sebagian Satker*

Dari hasil evaluasi diatas dapat dilihat bahwa proses perumusan renstra belum didokumentasikan oleh sebagian instansi pemerintah. Dari 4 (empat) instansi pemerintah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan , hanya 1 (satu) instansi yang telah mendokumentasikan perumusan renstranya. Belum didokumentasikannya proses perumusan renstra ini dapat menimbulkan kesulitan pada saat akan dilaksanakan proses perumusan renstra atau revisi renstra pada periode berikutnya karena kesulitan pada saat akan dilaksanakan penelusuran kepada dokumen - dokumen lain yang menjadi acuannya.

*Perumusan Renstra sudah partisipatif*

Proses perumusan renstra instansi pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara umum sudah dilakukan secara cukup partisipatif. Hal ini terlihat hanya 1 (satu) satuan kerja (25%) yang belum melaksanakan



proses penyusunan Renstra secara partisipatif.

Disamping itu, dalam proses perumusan renstra ini, umumnya instansi - instansi pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan juga belum sepenuhnya melibatkan unsur - unsur terkait lainnya. Meski demikian upaya untuk mengakomodir kepentingan dan keinginan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten telah dilakukan dengan menggunakan data yang berasal dari Bappeda, bahan Adum maupun BPS sebagai bahan masukan penyusunan renstra ini.

Sebagai sesuatu yang baru, apa yang telah dilakukan oleh para instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan renstra ini tentu saja merupakan hal yang wajar. Lagi pula, perumusan renstra yang berfokus kepada kinerja dan mengkaitkan secara jelas antara perencanaan dan pengukuran kinerjanya serta mensyaratkan proses yang partisipatif dalam pelaksanaannya masih dalam tahap pembelajaran. Proses partisipatif dalam rangka penyusunan renstra sangatlah penting. Hal ini diperlukan untuk dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan organisasi pada renstra yang akan dirumuskan. Dengan perumusan renstra yang melibatkan berbagai pihak terkait secara partisipatif, maka diharapkan pihak - pihak tersebut, baik internal maupun eksternal, dapat memberikan dukungan sepenuhnya keberhasilan penerapan renstra.

*Renstra telah didokumentasikan oleh seluruh Satker kepada level di bawah dan pihak eksternal.*

Dalam proses pengkomunikasian renstra ini, sudah ada upaya - upaya untuk mengkomunikasikan renstra ini kepada pegawai dibawah level Kepala Sub Bagian ini serta pihak eksternal yang berkepentingan. Dari 4(empat) instansi pemerintah yang ada, hanya 3 (tiga) instansi pemerintah yang telah mengkomunikasikan renstranya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik pada internal organisasi maupun eksternal organisasi.



Kekurangan - kekurangan yang telah diuraikan secara singkat diatas pada dasarnya telah disadari dan dimengerti oleh unsur pimpinan serta penyusun Renstra di instansi - instansi pemerintah dalam Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam kaitan dengan proses perumusan Renstra ini, dimasa mendatang kiranya perlu dipertimbangkan cara - cara untuk melibatkan secara aktif unsur - unsur masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Selain itu perlu pula dipertimbangkan untuk dapat mengkomunikasikan Renstra yang telah disusun secara lebih optimal kepada seluruh level organisasi dan juga kepada stakeholders lainnya di instansi pemerintah masing - masing.

### Evaluasi atas Substansi Renstra

Hasil kompilasi evaluasi terhadap isi dan substansi renstra pada ke 4 (empat) instansi pemerintah dalam lingkungan Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Proses Perumusan Rencana Strategik |                                                                                                       | Kejadian |                 |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode                               | Uraian                                                                                                | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 2121                               | Komponen Renstra belum Lengkap                                                                        | 1        | 25,00           |
| 2  | 2122                               | Penetapan Visi belum memenuhi kriteria perumusan Visi yang baik                                       | -        | -               |
| 3  | 2123                               | Penetapan Misi belum memenuhi kriteria perumusan Misi yang baik                                       | -        | -               |
| 4  | 2124                               | Perumusan tujuan belum memenuhi kriteria perumusan tujuan yang baik                                   | 1        | 25,00           |
| 5  | 2125                               | Perumusan sasaran belum memenuhi kriteria perumusan sasaran yang baik                                 | 2        | 50,00           |
| 6  | 2126                               | Penetapan strategi pencapaian tujuan dan sasaran belum memenuhi kriteria perumusan strategi yang baik | 1        | 25,00           |



|   |      |                                                                            |   |       |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 7 | 2127 | Penetapan tujuan dan sasaran belum mempertimbangkan sumber daya organisasi | 2 | 50.00 |
| 8 | 2129 | Permasalahan lain dalam isi dan substansi Renstra                          | - | -     |

*Renstra telah menyajikan alur pikir yang baik*

Evaluasi terhadap substansi Renstra menunjukkan bahwa umumnya instansi pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyajikan alur pikir yang baik dalam penyusunan rencana strategis. Hal ini terlihat dari jumlah instansi pemerintah yang telah melengkapi komponen renstra mulai dari visi hingga strategi organisasi. Hanya 1 (satu) instansi (25,00 %) yang belum memenuhi komponen renstranya dengan lengkap.

*Misi cukup jelas, mudah diingat, menantang, menarik dan menjadi apa dimasa depan*

Perumusan visi telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dimana visi instansi pemerintah yang telah dievaluasi telah cukup jelas, mudah diingat, menantang, menarik dan mengekspresikan akan menjadi apa instansi yang bersangkutan dimasa depan. Pelaksanaan perumusan visi pada umumnya memerlukan waktu karena harus disepakati oleh seluruh anggota organisasi. Dari 4 (empat) instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan *seluruhnya telah memenuhi kriteria yang baik.*

*Misi cukup jelas mengapa organisasi ada, mencapai visi*

Dalam perumusan misi juga terlihat bahwa pada umumnya instansi pemerintah telah merumuskan misi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Misi instansi pemerintah pada umumnya cukup dapat menjelaskan mengapa organisasi tersebut ada. Misi organisasi secara umum juga dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian visi dari organisasi. Dari 4 (empat) instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan *Seluruhnya telah memenuhi kriteria perumusan misi yang baik.*

Selanjutnya dalam merumuskan tujuan organisasi yang merupakan penjabaran dari misi organisasi untuk periode waktu 3 sampai 5 tahun kedepan dapat dilihat bahwa



secara umum tujuan organisasi telah sesuai dengan kriteria penyusunannya.

*Tujuan telah  
mempertimbangkan  
analisis SWOT*

Pada umumnya penetapan tujuan telah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari faktor-faktor lingkungan. Dari 4 (empat) instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan 3 (tiga) diantaranya telah memenuhi kriteria perumusan tujuan yang baik.

*Sasaran  
belum spesifik, terinci  
dan terukur*

Kemudian, dalam perumusan sasaran pada umumnya belum memenuhi kriteria spesifik, terinci dan terukur sehingga belum dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dari 4 (empat) instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan terdapat 2 (dua) diantaranya belum memenuhi kriteria perumusan sasaran yang baik.

Namun demikian pada umumnya sasaran tersebut secara substansi telah menunjukkan keterkaitannya dengan tujuan yang ditetapkan. Dari 4 (empat) instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan 2 (dua) satuan kerja yang sasarnya belum mendukung tujuan yang ditetapkan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kab. Lamongan

*Kebijakan, program  
dan kegiatan cukup  
jelas kaitannya  
dengan sasaran dan  
tujuan sehingga  
tujuan dan sasaran  
sulit dicapai*

Selain daripada itu strategi pencapaian sasaran dan tujuan yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan umumnya cukup jelas kaitannya dengan sasaran dan tujuannya. Dari 4 satuan kerja, 3 (tiga) diantaranya atau 75 % satuan kerja yang telah dapat merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang baik. Ketidakjelasan strategi pencapaian tujuan/sasaran ini dapat menyebabkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan juga belum dapat dicapai.



Dengan demikian tingkat kesulitan paling tinggi dalam menyusun Renstra adalah perumusan sasaran secara spesifik terinci dan terukur serta dalam penetapan strategi pencapaian tujuan dan sasaran.

Kendala - kendala umum tersebut pada saat penyusunan isi dan substansi renstra juga sudah disadari oleh instansi yang bersangkutan namun untuk menetapkan sasaran dan strategi pencapaiannya dengan baik dibutuhkan waktu dan pengalaman dari setiap individu organisasi. Sasaran organisasi sebaiknya disusun dengan memperhatikan target - target yang ingin dicapai agar dapat diukur kinerjanya pada akhir tahun dengan membandingkan antara realisasi dengan rencana. Selain itu perlu juga diperhatikan keterkaitan antara sasaran dengan tujuannya sehingga pada akhir tahun kelima tujuan juga dapat diukur tingkat keberhasilan atau kegagalannya dalam mengemban misi organisasi.

### Evaluasi atas Pemanfaatan Renstra

Hasil kompilasi evaluasi terhadap proses penyusunan Renstra ke 4) (empat instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini



*Renstra belum dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan*

| No | Pemanfaatan Renstra |                                                          | Kejadian |                 |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode                | Uraian                                                   | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 2131                | Renstra belum dimanfaatkan untuk perencanaan operasional | 4        | 100             |
| 2  | 2132                | Renstra belum dimanfaatkan untuk perencanaan kinerja     | 4        | 100             |
| 3  | 2133                | Renstra belum dimanfaatkan untuk penyusunan anggaran     | 4        | 100             |
| 4  | 2139                | Permasalahan lain dalam pemanfaatan Renstra              | 4        | 100-            |

*Renstra belum dimanfaatkan untuk penyusunan Renja dan Renop*

Belum dipergunakannya renstra sebagai bahan untuk penyusunan rencana operasional dan perencanaan kinerja tahunan karena kurangnya pemahaman atas penyusunan rencana operasional dan perencanaan kinerja tahunan, modul AKIP yang dikeluarkan oleh BPKP/LAN sulit dimengerti dan peraturan yang kurang memacu organisasi dalam menyusun Renstra.

## Evaluasi atas Sistem Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas sistem pengukuran kinerja para instansi pemerintah dalam pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi kegiatan evaluasi atas penggunaan indikator kinerja dan pengukuran kinerja dan evaluasi atas pelaksanaan self evaluation yang dilakukan para instansi pemerintah.

## Evaluasi atas Indikator Kinerja

Hasil kompilasi evaluasi terhadap indikator kinerja dan



pengukuran kinerja pada instansi pemerintah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| No | Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja |                                                                                                  | Kejadian |                 |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode                                     | Uraian                                                                                           | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 2211                                     | Komponen indikator kinerja belum lengkap                                                         | 3        | 75,00           |
| 2  | 2212                                     | Indikator kinerja belum memenuhi kriteria kualitas indikator kinerja yang baik                   | 3        | 75,00           |
| 3  | 2213                                     | Indikator kinerja beserta targetnya belum dikomunikasikan kepada setiap level organisasi terkait | 3        | 75,00           |
| 4  | 2219                                     | Permasalahan lain                                                                                | -        | -               |

Unsur indikator telah lengkap

Dari tabel diatas tampak bahwa hanya 1 (satu) evaluasi telah menetapkan indikator kinerja secara lengkap, mulai dari input, output, outcome, benefit dan impact

Indikator outcome, benefit dan impact belum sesuai kondisi sebenarnya

Namun demikian, belum seluruh kelompok indikator kinerja tersebut menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dari lima kelompok indikator kinerja, hanya dua kelompok, yaitu input dan output, yang dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Ketiga indikator kinerja lainnya, yaitu outcome, benefit dan impact, belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya terhadap definisi maupun value (nilai) dari ketiga indikator kinerja tersebut.

Dalam evaluasi terhadap kualitas indikator kinerja, pada umumnya evaluasi belum sepenuhnya memenuhi syarat kualitas indikator kinerja yang baik, dalam arti dapat



menggambarkan hasil, terkait dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, dapat dikuantifikasikan, dan tidak bias. Dengan demikian terhadap penetapan indikator kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut.

*Indikator kinerja harus realistis terhadap tujuan dan sasaran dan harus SMART*

Didalam pedoman penyusunan LAKIP disebutkan bahwa penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja hendaknya (1) spesifik dan jelas (2) Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif (3) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan dampak (4) harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan dan (5) efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien dan ekonomis.

*Indikator outcome, benefit dan impact belum dapat dikomunikasikan dengan baik*

Indikator kinerja input sampai dengan impact yang ditetapkan telah dikomunikasikan kepada setiap level dalam organisasi oleh 1 (satu) satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sedangkan 3 (tiga) evaluasi lainnya belum melaksanakan.

Namun demikian pengkomunikasian atas indikator outcome, benefit dan impact belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pemahaman atas definisi dan value (nilai) indikator tersebut.

Disamping itu, kurangnya pengkomunikasian tersebut disebabkan belum dinetapkannya rencana kinerja di awal tahun yang berisikan informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja yang ditetapkan serta target kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja strategis ini merupakan indikator kinerja dari hasil kegiatan - kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi nasional. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan



untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.

*Kesepakatan kerja  
atas Rencana Kinerja  
(Ranja) belum ada*

Idealnya, rencana kinerja ini diajukan kepada para pemberi amanat untuk kemudian para pihak yang terkait mengikat suatu kesepakatan terhadap rencana kinerja yang telah disusun. Kesepakatan yang demikian dikenal sebagai suatu Kesepakatan Kinerja (Performance Agreement). Meskipun peraturan dan ketentuan tentang Rencana Kinerja dan Kesepakatan Kinerja belum tertuang secara jelas dalam Inpres No.7/1999, namun esensi dari keduanya secara implisit telah terkandung dalam pokok - pokok pikiran Inpres sebagaimana disebutkan diatas.

Tahap selanjutnya, rencana kinerja ini selayaknya dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi sehingga setiap anggota organisasi dapat mengetahui target kinerja yang menjadi kewajiban organisasi serta turunan dari target kinerja yang menjadi kewajiban dari setiap anggota organisasi.

### Evaluasi atas Evaluasi Kinerja

| No | Evaluasi Kinerja |                                                                                   | Kejadian |                 |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode             | Uraian                                                                            | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 2221             | Perencanaan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja belum ada            | 2        | 50.00           |
| 2  | 2222             | Pembandingan data kinerja belum dilakukan                                         | 4        | 100.00          |
| 3  | 2223             | Informasi kinerja belum digunakan untuk keperluan monitoring program dan kegiatan | 2        | 50.00           |
| 4  | 2224             | Analisis data kinerja belum dilakukan                                             | 4        | 100.00          |
| 5  | 2225             | Instansi belum melakukan self                                                     | 4        | 100.00          |



|   |      |                                                |   |   |
|---|------|------------------------------------------------|---|---|
|   |      | kinerjanya                                     |   |   |
| o | 2219 | Permasalahan lain, pemanfaatan data pembobotan | - | - |

*Belum ada sistem pengumpulan data kinerja, pemanfaatan data kinerja*

*LAKIP 2001 merupakan LAKIP pertama dan relatif masih baru*

Tidak adanya sistem pengumpulan data kinerja, perbandingan data kinerja, serta pemanfaatan data kinerja untuk pelaksanaan monitoring program dan kegiatan, lebih banyak disebabkan baru diterapkannya sistem akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sistem pengumpulan data kinerja yang terpadu mutlak diperlukan dalam rangka mengembangkan dan membangun sistem akuntabilitas kinerja. Perbandingan data kinerja dan pelaksanaan monitoring juga belum tampak pada LAKIP tahun 2001 ini disebabkan LAKIP ini merupakan yang pertama disusun oleh organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pada tahun mendatang, sangat diharapkan ketiga hal tersebut diatas dapat dilaksanakan agar dapat disajikan suatu pelaporan yang komprehensif dalam rangka memberikan akuntabilitas publik.

*Seluruh Satker belum melakukan analisis data kinerja dan self evaluation*

Dari ke 4 (empat) satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, seluruh satuan kerja yang dievaluasi belum melakukan analisis data kinerja.

*Penerapan SAKIP masih relatif baru dan belum terbangun sistem pengumpulan datanya*

Belum seluruh satuan kerja melaksanakan analisis data kinerja dan self evaluation capaian kinerja disebabkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang masih relatif baru serta belum terbangunya sistem pengumpulan data kinerja. Pada masa mendatang, sangat diharapkan seluruh satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat memanfaatkan data kinerja dan melakukan self evaluation dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

*Capaian kinerja organisasi melalui beberapa kali*

Hal lain yang dapat disampaikan adalah pemanfaatan angka capaian kinerja yang diperoleh dari pembobotan. Capaian



*beberapa kali  
pembobotan dan  
judgement  
(pertimbangan)  
mengakibatkan  
capaian kinerja  
kurang realistis*

pada setiap tahapan pada perencanaan strategik diberikan bobot sehingga pada akhirnya diperoleh angka capaian tunggal organisasi. Kondisi ini mengundang kelemahan dimana angka tunggal capaian kinerja organisasi tidak menggambarkan tingkat kinerja dan akuntabilitas organisasi kepada publik. Beberapa kelemahan lain yang tampak pada sistem evaluasi kinerja ini adalah :

1. Pembobotan untuk masing - masing kelompok indikator kinerja, kegiatan, program dan kebijakan sangat membutuhkan judgement yang pada akhirnya agak sulit untuk dipertanggungjawabkan alasannya. Nilai capaian masing - masing kegiatan dari program dilakukan dengan memindahkan data dari formulir EK-1, sedangkan data di formulir EK-1 tersebut merupakan capaian kegiatan yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai capaian kelompok indikator kinerja, dimana dalam pembobotannya masih bersifat judgment dan sering menimbulkan ketimpangan dalam melaporkan outcome sampai impact, sehingga sangat diragukan obyektivitas nilai capaian tersebut. Pembobotan untuk masing - masing kegiatan dari setiap program sangat membutuhkan judgement yang pada akhirnya agak sulit untuk dipertanggungjawabkan alasannya. Hal ini mengakibatkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dari suatu program belum dapat diyakini kewajarannya. Begitu seterusnya hingga nilai capaian dari setiap kegiatan, program, kebijakan bahkan nilai capaian organisasi tidak menggambarkan suatu makna tertentu.
2. Untuk kelompok indikator kinerja sebaiknya dilakukan pengisian nilai capaian kinerja berdasarkan berfungsinya masing-masing indikator kinerja tersebut.

## Evaluasi atas LAKIP



*Evaluasi LAKIP atas  
isi informasi LAKIP,  
evaluasi substansi  
dan substansi Renstra*

Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdiri atas evaluasi terhadap isi informasi LAKIP, evaluasi terhadap substansi renstra dan evaluasi terhadap pemanfaatan renstra oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi lapangan atas materi renstra dalam konteks evaluasi LAKIP instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Lamongan juga akan meliputi hal-hal yang tidak hanya yang disajikan dalam LAKIP, tapi juga meliputi evaluasi terhadap proses perumusan dan pemanfaatannya

### Evaluasi atas Isi dan Informasi LAKIP

Hasil kompilasi evaluasi terhadap isi informasi LAKIP oleh ke 4 (empat) instansi pemerintah dalam lingkungan Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| No | Isi Informasi LAKIP |                                                        | Kejadian  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|    | Kode                | Uraian                                                 | Jumlah/ % |
| 1  | 2311                | LAKIP belum memenuhi karakteristik informasi yang baik | 1(25 %)   |
| 2  | 2312                | Isi informasi dalam LAKIP belum lengkap                | 1(25%)    |
| 3  | 2319                | Permasalahan lain dalam isi informasi LAKIP            | -         |

*Isi informasi LAKIP  
telah baik*

Secara umum sesuai dengan evaluasi terhadap isi informasi dalam LAKIP dapat digambarkan bahwa 3 (tiga) atau 75 % LAKIP telah memenuhi karakteristik informasi yang baik. Sebanyak 3 (tiga) atau 75 % LAKIP telah berisi informasi yang lengkap.

LAKIP 1 (satu)/(25 %) instansi pemerintah Kabupaten



Lamongan beserta instansi pemerintah yang dievaluasi belum dapat menunjukkan isi informasi laporan yang baik misalnya belum memuat bagian rencana strategis yang dilaksanakan pada tahun 2001, belum memberikan target kinerja tahun 2001 dan belum memberikan alasan tidak tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP instansi pemerintah juga belum dapat memberikan gambaran mengenai tingkat relevansi, akurasi, konsistensi, ketepatan waktu penyampaian LAKIP.

Dengan demikian secara umum LAKIP yang telah disusun dapat memberikan penjelasan mengenai keterkaitan informasi yang ada dengan tujuan organisasi

### Evaluasi atas Pemanfaatan LAKIP

Hasil kompilasi evaluasi terhadap pemanfaatan LAKIP oleh instansi pemerintah dalam lingkungan Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

| No | Pemanfaatan Renstra |                                                                                 | Kejadian |                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode                | Uraian                                                                          | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 2321                | LAKIP belum didistribusikan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan | 1        | 25,00           |
| 2  | 2322                | LAKIP belum dimanfaatkan                                                        | 2        | 50,00           |
| 3  | 2329                | Permasalahan lain dalam pemanfaatan LAKIP                                       | -        | -               |

*LAKIP belum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan*

Secara umum LAKIP yang ada belum dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka peningkatan kinerja instansi, menentukan kecukupan akuntabilitas instansi dan juga belum dapat dipergunakan sebagai penilaian dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada.



Selain dari itu, dari hasil evaluasi juga dapat dilihat bahwa belum seluruh LAKIP yang telah disusun didistribusikan kepada pihak - pihak yang akan menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebanyak 7 LAKIP (dari 11 LAKIP yang disusun) belum didistribusikan kepada berbagai pihak terkait. Belum didistribusikannya LAKIP tersebut kepada pihak yang akan menerimanya disebabkan oleh banyak faktor kendala umum dari dalam organisasi antara lain adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan LAKIP sehingga melewati batas waktu yang telah ditetapkan, proses penyusunan renstra yang terlambat, juga pemahaman terhadap LAKIP yang masih kurang.

## 2. Evaluasi atas Keterkaitan Renstra dengan Propeda/Repetada

Hasil kompilasi evaluasi atas keterkaitan Renstra dengan Propeda dan Repetada adalah sebagai berikut :

| No | Pemanfaatan Renstra |                                                                                                                             | Kejadian |                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode                | Uraian                                                                                                                      | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 3001                | Program utama instansi bukan merupakan turunan dari program propeda                                                         | -        | -               |
| 2  | 3002                | Program pendukung dan penunjang dari program utama instansi belum selaras dengan sasaran Propeda dan Program utama Repetada | -        | -               |



|   |      |                                                                                                                                                       |   |   |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 3 | 3003 | Tujuan dan sasaran Renstra bukan merupakan turunan dari sasaran Propeda dan Repetada                                                                  | - | - |
| 4 | 3004 | Indikator kinerja instansi bukan merupakan intermediate outcome bagi indikator kinerja program Propeda                                                | - | - |
| 5 | 3005 | Anggaran program instansi tidak terkait dengan anggaran program Repetada                                                                              | - | - |
| 6 | 3006 | Tidak terdapat pengungkapan alasan atas program-program Renstra yang tidak sejaras dengan Propeda                                                     | - | - |
| 7 | 3007 | Pengungkapan alasan atas program-program Renstra yang tidak sejaras dengan Propeda dan Repetada tidak memadai                                         | - | - |
| 8 | 3008 | Target nilai capaian kinerja untuk setiap kegiatan dalam Repetada tidak sesuai dengan target nilai capaian kinerja dalam perencanaan kinerja instansi | - | - |
| 9 | 3009 | Permasalahan lain dalam keterkaitan Renstra dengan Propeda dan Repetada                                                                               | - | - |
|   |      |                                                                                                                                                       |   |   |

*Secara umum telah terkait antara Renstra dengan Propeda/Repetada,*

Secara umum keterkaitan Renstra dengan Propeda /Repetada telah terkait sehingga kebijaksanaan umum yang tertuang dalam Propeda telah dirumuskan dalam Renstra.



*tapi beberapa unsur  
mikro belum terkait.*

Sedangkan Repetada belum mengacu kepada Renstra karena pengesahan Renstra pada akhir tahun 2001.

Pada dasarnya evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui esensi keterkaitan antara renstra dengan Propeda/Repetada. Esensi keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- > Propeda (program pembangunan daerah) merupakan turunan dari propenas (program pembangunan nasional) yang menjabarkan program pembangunan nasional yang dikerangkakan pada kondisi dan lingkungan lokal suatu daerah. Keselarasan propenas dan propeda ini memastikan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sepenuhnya diarahkan bagi keberhasilan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- > Pelaksanaan peran pembangunan dalam suatu daerah selanjutnya diatributkan kepada sejumlah instansi pemerintah. Kemudian, setiap instansi pemerintah akan menyusun rencana strategik sebagai peta dasar menuju pencapaian misi dasar instansi pemerintah sebagai kontributor pemenuhan keberhasilan pembangunan daerah.
- > Bagi instansi pemerintah, Renstra merupakan suatu dokumen yang menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 3 sampai 5 tahun kedepan. Dokumen tersebut juga meliputi indikator - indikator kinerja yang akan menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai pelaksanaan misi organisasi.



- Mengingat keterkaitan yang erat antara kegiatan instansi pemerintah dan kontribusinya bagi keberhasilan pembangunan daerah, seyogyanya esensi tujuan dan sasaran suatu instansi pemerintah sepenuhnya mengacu pada esensi tujuan sasaran dalam renstra dan propeda ini merepresentasikan kerangka mikro dari propeda yang akan dilaksanakan oleh masing masing instansi pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan renstra oleh instansi pemerintah secara otomatis akan merupakan pelaksanaan dari propeda itu sendiri.

Sampai saat evaluasi berakhir, Pemkab Lamongan belum membuat Lakip untuk lingkup kabupaten mengingat Renstra kabupaten belum dibuat dan baru selesai dibuat dan disetujui oleh Dewan pada bulan Oktober 2002. Namun demikian, dari penelaahan yang kami lakukan terhadap sasaran sasaran yang ditetapkan oleh Dinas, sudah nampak adanya keterkaitan antara sasaran / kegiatan yang dilakukan oleh dinas dengan program yang ada di Propeda.

Misalkan dalam Bidang Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemkab Lamongan salah satunya adalah meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, telekomunikasi, energi listrik dan air bersih guna mendorong pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian desa terpencil. Kebijakan tersebut dijabarkan kedalam program pembangunan daerah baik untuk kota maupun pembangunan desa. Adapun sasaran yang ingin dicapai diantaranya adalah terpeliharanya kemandapan prasarana perkotaan serta meningkatkan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pedesaan, baik yang berupa infrastruktur maupun fasilitas umum dalam mendukung perekonomian masyarakat pedesaan. Terkait dengan program dan sasaran tersebut, maka kegiatan yang perlu dilaksanakan berupa



perbaikan prasarana perkotaan yang mengalami kerusakan agar berfungsi secara optimal. Selain itu juga kegiatan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pedesaan yang memadai serta pengembangan penyediaan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pedesaan. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan kabupaten Lamongan selaku lembaga yang secara teknis menangani masalah ke - PU an dan irigasi dalam renstranya telah menetapkan program peningkatan jalan dan jembatan serta perbaikan waduk maupun saluran irigasi sebagai program dan kegiatan yang strategis. Selanjutnya program tersebut diimplementasikan dengan melakukan peninbgktan jalan untuk tahun anggaran 2001 sepanjang 243,3 km serta pembangunan / perbaikan waduk sebanyak 1 buah serta melakukan normalisasi terhadap jaringan irigasi yang ada. Dengan demikian jelaslah bahwa antara sasaran yang ditetapkan dalam Propeda telah terkait dengan kegiatan dan program dalam renstra dinas.

---

### 3. Evaluasi Kinerja

---

Pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, terutama ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang memadai mengenai hakekat dari akuntabilitas itu sendiri yaitu mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan demikian substansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian kinerja

Penilaian kinerja atas capaian pada tingkat sasaran pada



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR**

*sasaran belum dapat  
dilakukan karena  
belum jelas  
indikatornya*

berbagai instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2001 tidak dapat dilakukan karena LAKIP belum dapat menyajikan informasi kinerja sebagaimana mestinya. LAKIP juga belum mengungkapkan sasaran - sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2001. Implikasinya, meskipun secara nyata berbagai organisasi ini telah mampu menghasilkan kinerja namun ketidak jelasan sasaran dan ukuran kinerjanya mengakibatkan informasi capaian kinerja tidak terungkap di dalam LAKIP. Konsekuensinya, masyarakat atau pihak terkait lainnya tidak dapat menilai apakah Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lamongan telah berhasil melaksanakan misinya yang tertuang didalam sasaran - sasaran strategiknya. Padahal mungkin saja terjadi bahwa berbagai organisasi ini sesungguhnya telah berhasil mencapai kinerja sesuai dengan misi yang diembannya, namun tidak terungkap dalam LAKIP.

Berikut disajikan, beberapa sasaran strategik dan indikator kinerja pada beberapa Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dikembangkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2001 yang sebaiknya diungkapkan, namun belum tersaji dalam LAKIP 2001

| Unit Organisasi                  | Sasaran                                                                                                              | Indikator Kinerja                                              | Target      | Real.      | %   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. Dinas Kesehatan Kab. Lamongan | 1 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yg diselenggarakan melalui Puskesmas, Push pembantu, Bidan desa Rp 1.820.000 | Meningkatnya rujukan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat | 200 rujukan | 200rujukan | 100 |
|                                  | 2 Peningkatan penggunaan obat secara efektif                                                                         | Terwujudnya penggunaan obat yg                                 | 60 X        | 60X        | 100 |



**BADAN PENGAMASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TIMUR**

|  |                                            |                              |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
|  | dan aman serta<br>efisien Rp.<br>4.700.000 | efektif, aman<br>dan efisien |  |  |  |
|--|--------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|

|                                                                 |                                                                                                         |                                                                     |               |              |     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----|
| 2. Badan<br>Pemberday<br>aan<br>Masyarakat<br>+ Kab<br>Lamongan | 1 Terselenggaranya<br>Bantuan<br>Pembangunan<br>Desa/Kelurahan<br>(DPD/K) 174<br>desa Rp<br>684.000.000 | Tersalurkannya<br>a bantuan<br>DPD/K 174<br>desa Rp<br>6.084.00.000 | 174des        | 174de        | 100 |
| 3 Dinas<br>Pendidikan<br>&<br>Kebudayaan<br>Kab<br>Lamongan     | 2<br>Terselenggaranya<br>Pelatihan<br>PDT 10X angk<br>400<br>org, 40 desa, 6<br>hari Rp<br>74.000.000   | Terselenggara<br>nya pelatihan<br>PDT 10 angk<br>400                | 10X           | 10X          | 100 |
|                                                                 | Terselenggaranya<br>pelatihan<br>keterampilan<br>bengkel, las,                                          | Terwujudnya<br>tenaga ahli<br>dibidang<br>bengkel, lasw,            | 100<br>org    | 100<br>org   | 100 |
| 4 Dinas<br>PUSDA<br>Marga<br>Pengairan                          | Pemangunan jalan<br>terdiri :                                                                           |                                                                     |               |              |     |
|                                                                 | 3 Pemeliharaan jalan<br>173,47 km                                                                       | Meningkatnya<br>kuakitas jalan                                      | 243,3<br>7 km | 243,3<br>7km | 100 |
|                                                                 | Peningkatan Jalan<br>69,9 km                                                                            |                                                                     |               |              |     |
|                                                                 | Pembangunan Dam<br>Kentong 1 bh                                                                         | Terwujudnya<br>Dam Kentong                                          | 1buah         | 1buah        | 100 |

LAKEP  
LAKEP  
LAKEP



Hasil Kompilasi Evaluasi terhadap kinerja organisasi pada instansi pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | Kinerja Organisasi |                                                                                   | Kejadian |                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Kode               | Uraian                                                                            | Jumlah   | % dari Populasi |
| 1  | 4001               | Target kinerja pada level sasaran tidak tercapai                                  | 3        | 75.00           |
| 2  | 4002               | Penetapan target kurang/tepat                                                     | 3        | 75.00           |
| 3  | 4003               | Sasaran tidak dapat diukur capaiannya                                             | 3        | 75.00           |
| 4  | 4004               | Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran tidak ada/tidak tepat | 3        | 75.00           |
| 5  | 4009               | Permasalahan lain                                                                 | -        | -               |

Dari kondisi tersebut tampak bahwa hampir seluruh LAKIP yang disusun oleh berbagai instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih belum dapat menyajikan informasi kinerja seperti yang diharapkan, walaupun secara nyata berbagai organisasi tersebut telah mampu menghasilkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan informasi LAKIP yang terkait dengan pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :



- Menetapkan indikator kinerja output atau outcome untuk sasaran dan output, outcome, benefit, impact untuk tujuan.
- Menselaraskan antara indikator kinerja sasaran dan tujuan tersebut diatas dengan indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasarnya. Keselarasan indikator kinerja outcome pada kegiatan dan tujuan/sasaran harus selalu dijaga agar memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan memang mendukung pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
- Menetapkan target - target kinerja untuk masing - masing indikator kinerja pada awal periode sebelum kegiatan dilakukan.
- Merancang sistem pengukuran data - data kinerja